



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI



SEJARAH PERJUANGAN DIPLOMASI

SEJARAH PERJUANGAN DIPLOMASI



Cetakan ke-1, Juli 2019

Penyusun	: Tim Penyusun Museum Perumusan Naskah Proklamasi
Illustrator	: Mansyur Daman
Penerbit	: Museum Perumusan Naskah Proklamasi
Disain Cover	: Mansyur Daman & Firman Nur Chaliq
Cetakan ke-1	: 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

SAMBUTAN
KEPALA MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

Dalam upaya menyebarluaskan peristiwa sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat, perlu adanya media penyebaran informasi. Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta Pusat mencetak buku cerita bergambar Sejarah Perjuangan Diplomasi.

Pembuatan buku cerita tentang sejarah perjuangan bangsa tidak lain adalah agar masyarakat terutama generasi muda dapat memperoleh suri tauladan dan semangat juang sehingga tumbuh rasa nasionalisme dan patriotisme.

Semoga dengan adanya penerbitan buku cerita bergambar Sejarah Perjuangan Diplomasi, kebutuhan informasi masyarakat tentang sejarah perjuangan bangsa dapat terpenuhi guna menambah khasanah dan referensi mengenai peristiwa setelah Proklamasi.

Jakarta, Juli 2019
Kepala

Drs. Agus Nugroho, M.M.
NIP 196308201990011001

Sejarah Perjuangan Diplomasi

HARI ITU, PUKUL 9 PAGI MASYARAKAT DARI BERBAGAI LAPISAN BERBODONG-BONDONG BERJALAN KAKI MENUJU PEGANGSAAN TIMUR KE TEMPAT KEDIAMAN BUNG KARNO...



PADA 17 AGUSTUS 1945 PUKUL 10.00 WIB, SOEKARNO DIDAMPINGI MOH HATTA MEMBACAKAN NASKAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO. 56 JAKARTA.



SETELAH NASKAH PROKLAMASI DIBACAKAN, SELANJUTNYA DIKIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH OLEH LATIEF HENDRANINGRAT DAN SUHUD SASTRO KUSUMO SERTA MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA. SANG SAKA MERAH PUTIH YANG DIKIBARKAN DIJAHIT OLEH IBU FATMAWATI.



PARA SAKSI YANG HADIR PADA UPACARA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945, TAMPAK ANTARA LAIN DI BARISAN DEPAN JOHANNES LATU HARHARY, SOEWIRYO, FATMAWATI, SAMSI SASTROWIDAGDO DAN S.K TRIMURTI. SEDANGKAN DI BARISAN BELAKANG ANTARA LAIN TAMPAK A.G PRINGGODIGDO DAN SUDJONO.



PADA 19 AGUSTUS 1945 PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA KEMBALI MENGELAR SIDANG DAN MEMUTUSKAN :

1. MEMBAGI WILAYAH INDONESIA MENJADI 8 PROVINSI :
 - a. JAWA BARAT, GUBERNURNYA SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO
 - b. JAWA TENGAH, GUBERNURNYA R. PANDJI SOEROSO
 - c. JAWA TIMUR, GUBERNURNYA R.A. SOERYO
 - d. BORNEO (KALIMANTAN), GUBERNURNYA IR. PANGERAN MUHAMMAD NOOR
 - e. SULAWESI, GUBERNURNYA DR. G.S.S.J. SAM RATULANGI
 - f. MALUKU, GUBERNURNYA MR. J. LATU HARHARY
 - g. SUNDA KECIL (BALI DAN NUSA TENGGARA), GUBERNURNYA MR. I. GUSTI KTUT PUDJA
 - h. SUMATRA, GUBERNURNYA MR. TEUKU MOHAMMAD HASSAN
2. MEMBENTUK KOMITE NASIONAL DAERAH
3. MENETAPKAN 12 DEPARTEMEN DAN 4 MENTERI NEGARA.



KABINET PERTAMA DIPIMPIN OLEH PRESIDEN SOEKARNO DENGAN SUSUNAN 12 DEPARTEMEN DAN 4 KEMENTERIAN NEGARA:

1. DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIKEPALAI R.A.A. WIRANATA KUSUMAH
2. DEPARTEMEN LUAR NEGERI DIKEPALAI MR. AHMAD SUBARDJO.
3. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DIKEPALAI PROF. DR. MR. SUPOMO.
4. DEPARTEMEN KEUANGAN DIKEPALAI MR. A.A MARAMIS.
5. DEPARTEMEN KEMAKMURAN DIKEPALAI SURACHMAN COKROADISURJO.
6. DEPARTEMEN KESEHATAN DIKEPALAI DR. BUNTARAN MARTOATMOJO.
7. DEPARTEMEN PENGAJARAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIKEPALAI KI HAJAR DEWANTARA.
8. DEPARTEMEN SOSIAL DIKEPALAI IWA KUSUMASUMANTRI.
9. DEPARTEMEN PERTAHANAN DIKEPALAI SUPRIYADI.
10. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIKEPALAI ABIKUSNO TJOKROSUYOSO.
11. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIKEPALAI ABIKUSNO TJOKROSUYOSO.
12. DEPARTEMEN PENERANGAN DIKEPALAI MR. AMIR SYARIFUDIN

JABATAN MENTERI NEGARA DIDUDUKI OLEH WACHID HASYIM, M. AMIR, R. OTTO ISKANDARDINATA, DAN R.M SARTONO. DI SAMPING ITU DIANGKAT PULA BEBERAPA PEJABAT TINGGI NEGARA, DR. MR. KUSUMAAATMAJA DIANGKAT SEBAGAI KETUA MAHKAMAH AGUNG, MR. GATOT TARUNAMIHARDJA SEBAGAI JAKSA AGUNG, MR. A.G. PRINGGODIGDO SEBAGAI SEKRETARIS NEGARA, DAN SOEKARJO WIRJOPRANOTO SEBAGAI JURU BICARA NEGARA.

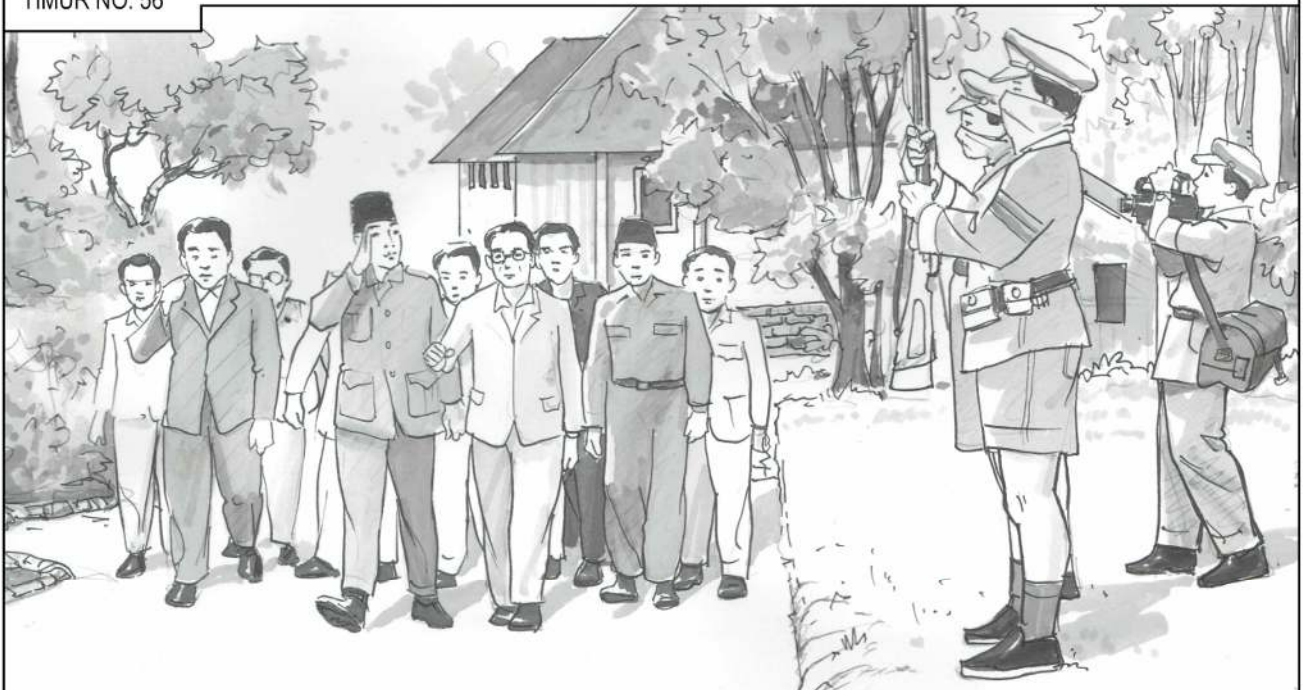


PADA 22 AGUSTUS 1945 PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA KEMBALI MELAKSANAKAN SIDANG, KEPUTUSAN DALAM SIDANG TERSEBUT ADALAH :

1. PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL
2. MEMBENTUK PARTAI NASIONAL INDONESIA
3. PEMBENTUKAN BADAN KEAMANAN RAKYAT



PELANTIKAN ANGGOTA KABINET PERTAMA RI 4 SEPTEMBER SEKALIGUS KONFERENSI PERS. TERLIHAT ROMBONGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN BEBERAPA ANGGOTA KABINET MULAI BERDATANGAN KE RUMAH PEGANGSAAN TIMUR NO. 56



NEGARA BARU BERNAMA INDONESIA MENGHADAPI BERBAGAI MACAM PERSOALAN DALAM MENYUSUN PEMERINTAHAN YANG BARU, BAIK PERSOALAN YANG BERASAL DARI DALAM MAUPUN PERSOALAN DARI LUAR. PERSOALAN YANG BERASAL DARI LUAR SALAH SATUNYA ADALAH KEBERADAAN TENTARA SEKUTU DI INDONESIA YANG BERDALIH AKAN MELAKUKAN PEMINDAHAN TAWANAN PERANG APWI (ALLIED PRISONERS OF WAR AND INTERNEES). NAMUN, KEDATANGAN TENTARA SEKUTU INI DIBONCENGI OLEH PIHAK NICA (NETHERLANDS-INDIES CIVIL ADMINISTRATION) YANG INGIN MENJAJAH KEMBALI INDONESIA.



SITUASI POLITIK MENJADI MEMANAS DAN PERTEMPURAN UNTUK MENEGAKKAN KEDAULATAN RI KEMBALI TERJADI DI BERBAGAI WILAYAH DI INDONESIA. DI SISI LAIN, PERJUANGAN MELALUI JALUR DIPLOMASI JUGA DILAKUKAN UNTUK MENUNJUKKAN EKSISTENSI NEGARA INDONESIA DI TINGKAT INTERNASIONAL.





SEJARAH PERJUANGAN DIPLOMASI

PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERGANTI-GANTI. SISTEM PRESIDENTIL YANG SEMULA DI-ANUT KEMUDIAN BERUBAH MENJADI SISTEM PARLEMENTER PADA AWAL NOVEMBER 1945. PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN INI BERMULA PADA SIDANG KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (KNIP) PERTAMA YANG BERLANGSUNG DI JAKARTA 16 OKTOBER 1945. PADA SIDANG TERSEBUT SUTAN SYAHRIR DIMINTA DUDUK SEBAGAI KETUA BADAN PEKERJA KNIP.



PADA 3 NOVEMBER 1945 DITERBITKAN MAKLUMAT PEMERINTAH LAINNYA YANG ISINYA ANTARA LAIN, BERDASARKAN USUL BADAN PEKERJA KNIP, BAHWA PEMERINTAH MEMBERI KESEMPATAN PENDIRIAN PARTAI-PARTAI POLITIK. KEMUDIAN, SEBAGAI KETUA BADAN PEKERJA KNIP, SUTAN SYAHRIR MENGAJUKAN MAKLUMAT KNIP NO.5 11 NOVEMBER 1945 YANG ISINYA PEMBENTUKAN KABINET DENGAN SUSUNAN MENTERI YANG BEKERJA KOLEKTIF YANG DIPIMPIN PERDANA MENTERI. PERDANA MENTERI DITUNJUK OLEH KEPALA NEGARA. PADA 14 NOVEMBER 1945 TERBENTUK KABINET R.I KEDUA YANG BERBENTUK KABINET MINISTERIAL DAN SEKALIGUS SEBAGAI KABINET PERTAMA DALAM SISTEM PARLE- MENTER DENGAN SUTAN SYAHRIR SEBAGAI PERDANA MENTERI.



JAKARTA SEBAGAI IBU KOTA PEMERINTAHAN PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN TERNYATA MENJADI WILAYAH YANG KEAMANANNYA SEMAKIN TIDAK TERKENDALI. SETIAP HARI TERJADI PEMBUNUHAN ATAU PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NICA (NETHERLANDSINDIES CIVIL ADMINISTRATION) ATAS PENDUDUK YANG TIDAK BERSALAH.



PENGUNGSIAN MULAI TERJADI SECARA BESAR-BESARAN.



SELAIN ITU, KONDISI KEAMANAN YANG TIDAK STABIL TERSEBUT DAPAT MENGANCAM JIWA PARA PEMIMPIN NEGARA. OLEH KARENA ITU, DIPUTUSKAN UNTUK Mencari wilayah yang relatif kondusif dari sisi keamanan agar roda pemerintahan dapat dijalankan dengan baik. Akhirnya, awal 1946 pemerintah RI memutuskan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Yogya. Pada 4 Januari 1946 secara resmi Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan dan ibukota RI.



ADANYA MAKLUMAT PEMERINTAH 3 NOVEMBER 1945 MENDORONG BERDIRINYA BERBAGAI MACAM PARTAI POLITIK YANG KEMUDIAN MENGISI POS-POS MENTERI DI KABINET SJAHRIR I. NAMUN, KEBIJAKAN PEMERINTAHAN RI YANG LEBIH MENGEDEPANKAN PERUNDINGAN DENGAN PIHAK MUSUH MENJADI BUMERANG. BANYAK PARTAI DAN ORGANISASI POLITIK YANG MENGANUT "GARIS KERAS" TIDAK SEPAKAT DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH RI TERSEBUT. PADA AWAL 1946 MEREKA MEMBANGUN OPOSISI UNTUK MENKRITISI KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN NAMA PERSATUAN PERJUANGAN YANG DIKETUI OLEH TAN MALAKA.



PERSATUAN PERJUANGAN DENGAN CEPAT MENJELMA MENJADI OPOSISI YANG MENYERAP BANYAK KEKUATAN MASSA. AKIBAT DESAKAN OPOSISI PERSATUAN PERJUANGAN INI KABINET SYAHRIR AKHIRNYA JATUH. SUTAN SYAHRIR MENYERAHKAN MANDATNYA SEBAGAI PERDANA MENTERI KEPADA PRESIDEN SOEKARNO PADA 23 FEBRUARI 1946. PADA RAPAT PLENO KNIP KE III 28 FEBRUARI 1946 DI SOLO SECARA RESMI KABINET SYAHRIR BUBAR. NAMUN DEMIKIAN, PRESIDEN SOEKARNO KEMBALI MENUNJUK SUTAN SYAHRIR UNTUK MEMBENTUK KABINET YANG BARU. KABINET INI KEMUDIAN DINAMAKAN KABINET SYAHRIR II.



NICA-BELANDA BERUSAHA DENGAN SEGALA CARA MELUMPuhkan REPUBLIK INDONESIA. SALAH SATU TAKTIK YANG DIGUNAKAN OLEH BELANDA ADALAH MENJALANKAN POLITIK DEVIDE ET IMPERA ATAU POLITIK MEMECAH BELAH. PADA JULI 1946 SUATU KRISIS TERJADI DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA, KEADAAN INI DIMANFAATKAN OLEH PIHAK BELANDA YANG TELAH MENGUSAI SEBELAH TIMUR NUSANTARA. UNTUK MENJALANKAN SIASATNYA INI PADA 15-25 JULI 1946 DIADAKAN KONFERENSI MALINO DI BAWAH PIMPINAN DR. HJ. VAN MOOK. VAN MOOK BERUSAHA MENYUSUN NEGARA-NEGARA BONEKA YANG TELAH DISERAHKAN SEKUTU KEPADA BELANDA DALAM SEBUAH KERANGKA NEGARA FEDERAL DI BAWAH PIMPINAN BELANDA. RENCANA INI MERUPAKAN BAGIAN UPAYA UNTUK MERONGRONG KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA.



MASUKNYA SEKUTU (INGGRIS) KE INDONESIA YANG DIBONCENGI OLEH NICA MENYEBABKAN TERJADINYA KONFLIK ANTARA INDONESIA DAN BELANDA. KONFLIK INI TIDAK JARANG MENIMBULKAN PERTEMPURAN DI BERBAGAI WILAYAH DI INDONESIA. UNTUK MENGATASI KONFLIK BERSENJATA INI PEMERINTAH RI MEMBUKA DIRI UNTUK BERUNDING DENGAN PIHAK BELANDA.



SIR ARCHIBALD CLARK KERR, DIPLOMAT INGGRIS, MENGUNDANG INDONESIA DAN BELANDA UNTUK BERUNDING DI HOOGE VELUWE. NAMUN, PERUNDINGAN TERSEBUT GAGAL KARENA INDONESIA MEMINTA BELANDA MENGAKUI KE-DAULATAN ATAS JAWA, SUMATRA DAN MADURA, SEDANGKAN BELANDA HANYA MAU MENGAKUI INDONESIA ATAS JAWA DAN MADURA.



PADA AGUSTUS 1946, PEMERINTAH INGGRIS KEMBALI MENGIRIMKAN LORD KILLEARN KE INDONESIA UNTUK MENYELESAIKAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN BELANDA. PADA 7 OKTOBER 1946, BERTEMPAT DI KONSULAT JENDERAL INGGRIS DI JAKARTA, DIBUKALAH PERUNDINGAN INDONESIA-BELANDA DIPIMPIN LORD KILLEARN. PERUNDINGAN ITU MENGHASILKAN PERSETUJUAN GENCATAN SENJATA PADA 14 OKTOBER 1946 DAN MERATAKAN JALAN KE ARAH PERUNDINGAN DI LINGGARJATI YANG DIMULAI PADA 11 NOVEMBER 1946.



PERUNDINGAN LINGGARJATI DILAKSANAKAN PADA 11-15 NOVEMBER 1946 DI LINGGARJATI, CIREBON. DALAM PERUNDINGAN LINGGARJATI DARI WAKIL INDONESIA ADALAH SUTAN SYAHRIR SEBAGAI KETUA YANG DIDAMPINGI OLEH MR. MOH. ROEM, MR. SUSANTO TIRTOPROJO DAN A.K. GANI. SEDANGKAN DI PIHAK BELANDA ADALAH KOMISI TIM JENDERAL YANG TERDIRI DARI WIM SCHERMERHORN SEBAGAI KETUA YANG DIDAMPINGI OLEH H.J.VAN MOOK, MAX VAN POLL, DAN F.DE BAER. MEDIATOR DALAM PERUNDINGAN INI ADALAH LORD KILLEARN DARI INGGRIS.



DALAM PERUNDINGAN INI DIHASILKAN KEPUTUSAN YANG TERDIRI DARI 17 PASAL, ANTARA LAIN BERISI:

1. BELANDA MENGAKUI SECARA DE FACTO REPUBLIK INDONESIA DENGAN WILAYAH KEKUASAAN YANG MELIPUTI SUMATERA, JAWA DAN MADURA.
2. BELANDA HARUS MENINGGALKAN DAERAH DE FACTO PALING LAMBAT 1 JANUARI 1949
3. REPUBLIK INDONESIA DAN BELANDA AKAN BEKERJA SAMA DALAM MEMBENTUK NEGARA FEDERAL, DENGAN NAMA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, YANG SALAH SATU NEGARA BAGIANNYA ADALAH REPUBLIK INDONESIA.
4. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BELANDA AKAN MEMBENTUK UNI INDONESIA-BELANDA DENGAN RATU BELANDA SELAKU KETUANYA.



PENGAKUAN SECARA DE FACTO BELANDA TERHADAP RI, MELIPUTI WILAYAH JAWA, MADURA DAN SUMATERA. SECARA DE JURE (HUKUM) STATUS HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA TIDAK JELAS, TIDAK ADA PENEGASAN DALAM PERJANJIAN APAKAH INDONESIA DAPAT MELAKUKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL ATAU TIDAK. TERJALINNYA HUBUNGAN DIPLOMASI DENGAN NEGARA LAIN INILAH YANG MEMICU PERTENTANGAN LEBIH LANJUT ANTARA INDONESIA-BELANDA.



PERTENTANGAN ANTARA INDONESIA DENGAN BELANDA AKHIRNYA SEMAKIN MEMUNCIAK. PADA AKHIRNYA BELANDA 20 JULI 1947 MENGUMUMKAN BAHWA TIDAK TERIKAT LAGI TERHADAP PERJANJIAN LINGGARJATI SEHINGGA BELANDA PADA 21 JULI 1947 PUKUL 00.00 WIB MELAKUKAN AKSI AGRESI MILITER BELANDA. PERISTIWA INI DIKENAL SEBAGAI AGRESI MILITER BELANDA I.



SEBELUM PERJANJIAN LINGGARJATI DITANDA TANGANI, PIHAK BELANDA MELALUI Dr. H. J. VAN MOOK MENJALANKAN STRATEGINYA. IA TELAH MEMAKSA TERWUJUDNYA NEGARA INDONESIA TIMUR MELALUI SEBUAH KONFERENSI. KONFERENSI INI MERUPAKAN KELANJUTAN DARI KONFERENSI MALINO YANG DIADAKAN DARI 7 DESEMBER 1946 SAMPAI 24 JANUARI 1947 DI DENPASAR-BALI. KONFERENSI INI KEMUDIAN TERKENAL DENGAN NAMA "**KONFERENSI DENPASAR**". DALAM KONFERENSI ITU BELANDA BERHASIL MEMAKSAKAN TERWUJUDNYA NEGARA INDONESIA TIMUR (NIT). DITUNJUK SEBAGAI PRESIDEN NIT ADALAH TJOKORDA GDE SUKAWATI RAKA. GAGASAN Dr. VAN MOOK UNTUK MEMECAH BELAH NEGARA INDONESIA AKHIRNYA MENJADI KENYATAAN.



NIT BERDIRI SAMPAI 1950, DIMANA UNTUK MEWUJUDKAN KESATUAN NKRI DAN DIBUBARKANNYA RIS, MAKA NIT JUGA HARUS DILEBUR KE DALAM KESATUAN RI. WALAUPUN DALAM PROSES PELEBURAN, MENIMBULKAN BEBERAPA PERDEBATAN UNTUK TETAP MEMPERTAHAKAN BENTUK FEDERALISME DI INDONESIA TIMUR.



NAMUN BERDASARKAN SIDANG ISTIMEWA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PARLEMEN NIT, DIPUTUSKAN UNTUK IKUT BERGABUNG KE DALAM KESATUAN NKRI UNTUK MENUJU KEMERDEKAAN.



GENTINGNYA SITUASI MENDORONG PRESIDEN SOEKARNO MEMEGANG SEMUA KEKUASAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU SAMPAI KABINET BARU TERBENTUK. PADA 2 JULI PRESIDEN SOEKARNO MENUNJUK MR. AMIR SJARIFUDIN, DR. AK GANI DAN SETIADJID UNTUK MEMBENTUK SEBUAH KABINET BARU. KABINET BARU INI AKHIRNYA TERBENTUK PADA 3 JULI 1947 DENGAN Mr. AMIR SJARIFUDIN SEBAGAI PERDANA MENTERI DAN SETIADJID SEBAGAI WAKILNYA DAN DILANTIK PADA HARI ITU JUGA.



DEWAN KEAMANAN PBB,
ATAS DESAKAN AUSTRALIA
DAN INDIA, MENGELUARKAN
PERINTAH PELETAKAN SENJA-
TA 1 AGUSTUS 1947. LANG-
KAH INI KEMUDIAN DISUSUL
DENGAN MENDIRIKAN SUATU
KOMISI JASA-JASA BAIK, YANG
LEBIH DIKENAL DENGAN NAMA
KOMISI TIGA NEGARA (KTN).



SESUAI PERINTAH DARI DEWAN KEAMANAN PBB, RI DAN BELANDA HARUS MAJU KE MEJA PERUNDINGAN DENGAN PENENGAHNYA ADALAH KOMISI TIGA NEGARA (KTN). TETAPI, ANTARA RI DAN BELANDA TIDAK MENEMUI KATA SEPAKAT TERKAIT TEMPAT PERUNDINGAN. PADA AKHIRNYA KTN SEBAGAI PENENGAH MENGUSULKAN UNTUK MENGGUNAKAN SEBUAH KAPAL "RENVILLE" SEBAGAI TEMPAT PERUNDINGAN.



PERUNDINGAN RENVILLE DIADAKAN PADA 8 DESEMBER 1947-17 JANUARI 1948. BAGI PERJUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PERJANJIAN RENVILLE INI SANGAT MERUGIKAN DAN DITENTANG OLEH KALANGAN PARTAI DAN PEMUDA. DALAM PERJANJIAN INI DISEBUTKAN BAHWA PASUKAN GERILYA RI YANG BERJUANG DI WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA HARUS DIPINDAHKAN KE WILAYAH REPUBLIK. HAL INI BERARTI DAERAH-DAERAH KOSONG YANG BARU DITINGGALKAN ITU AKAN DISERAHKAN MENTAH-MENTAH KEPADA BELANDA.



SELAMA PERUNDINGAN RENVILLE BERLANGSUNG, DELEGASI INDONESIA SELALU BERKONSULTASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DI YOGYAKARTA, DIANTARANYA MASALAH DAERAH KEKUASAAN REPUBLIK INDONESIA. UNTUK MEMBICARAKAN MASALAH DAERAH KEKUASAAN RI TERSEBUT PADA 13 JANUARI 1948 BERLOKASI DI KALIURANG DIADAKAN PERUNDINGAN ANTARA KTN DAN RI. PERUNDINGAN TERSEBUT MENGHASILKAN "NOTULEN KALIURANG" YANG MENYATAKAN BAHWA RI TETAP MEMEGANG KEKUASAAN ATAS DAERAH YANG DIKUASAINYA PADA WAKTU ITU.



KONDISI POLITIK DAN EKONOMI YANG SEMAKIN SULIT DALAM MENGHADAPI TEKANAN DAN BLOKADE BELANDA, SEMAKIN DIPERSULIT LAGI DENGAN KONDISI PERTENTANGAN-PERTENTANGAN DI DALAM NEGERI. DUA PARTAI BESAR YAITU MASYUMI DAN PNI TIDAK MENYETUJUI PERJANJIAN RENVILLE DAN MENARIK ANGGOTA-ANGGOTANYA DARI KABINET. KONDISI INI MENYEBABKAN KABINET AMIR SJARIFUDIN KEHILANGAN LEGITIMASI SEHINGGA MENDORONG AMIR SJARIFUDIN UNTUK MELETAKKAN JABATAN-NYA PADA 23 JANUARI 1948. UNTUK MENGGANTI-NYA MAKA DIBENTUKLAH KABINET PRESIDENSIL PADA 29 JANUARI 1948 KABINET INI DIPIMPIN MOH. HATTA SEBAGAI PERDANA MENTERI.



PADA MASA PEMERINTAHAN PM MOH. HATTA, PEMERINTAH MENGHADAPI TEKANAN YANG LUAR BIASA BAIK DARI MUSUH MAUPUN BANGSA SENDIRI. TEKANAN DARI BANGSA SENDIRI TERHADAP PEMERINTAHAN SALAH SATUNYA DILAKUKAN OLEH AMIR SJARIFUDIN. SETELAH MELETAKKAN JABATANNYA SEBAGAI PERDANA MENTERI, AMIR SJARIFUDIN MEMISAHKAN DIRI DARI PSI PIMPINAN SUTAN SYAHRIR DAN MENDIRIKAN PARTAI SOSIALIS YANG LEBIH CONDONG KEPADA KOMUNIS. SELAIN ITU, AMIR SJARIFUDIN SEJAK AWAL TIDAK MENERIMA ADANYA KABINET YANG DIPIMPIN OLEH MOH. HATTA.



PADA 26 FEBRUARI 1948 DALAM SEBUAH PERTEMUAN UMUM AMIR SJARIFUDIN MEMPELOPORI BERDIRINYA FRONT DEMOKRASI RAKYAT (FDR) YANG TERDIRI DARI PARTAI SOSIALIS, PESINDO, PARTAI BURUH, SOBSI DAN PKI. MELALUI BERBAGAI CARA FDR BERUSAHA MEMPROVOKASI DAN MENGHASUT RAKYAT INDONESIA UNTUK MENENTANG PEMERINTAH. PAHAM KOMUNIS YANG DIANUT OLEH FDR DISEBARKAN SECARA MASIF HINGGA MASUK KE DALAM TUBUH TNI.



KONDISI INI MENDORONG PM HATTA UNTUK MELAKUKAN KEBIJAKAN REORGANISASI DAN RASIONALISASI DI TUBUH TNI. KEBIJAKAN PM HATTA INI DITENTANG OLEH FDR, SEDANGKAN PASUKAN-PASUKAN TNI YANG TERKENA RASIONALISASI BANYAK YANG MEMBANGKANG DAN MEMIHAK KEPADA FDR.



KONDISI POLITIK DALAM NEGERI SEMAKIN MEMANAS. PADA 19 SEPTEMBER 1948 FDR DAN PKI DI BAWAH PIMPINAN AMIR SJARIFUDIN DAN MUSO MENGUMUMKAN BERDIRINYA PEMERINTAH SOVYET INDONESIA. LANGKAH INI DILANJUTKAN DENGAN AKSI FDR/PKI MEREKUT KOTA MADIUN YANG MENGGUNAKAN BEBERAPA RIBU ANGGOTA SATUAN TNI YANG MEMIHAK MEREKA. KOTA MADIUN KEMUDIAN DIJADIKAN SEBAGAI IBUKOTA PEMERINTAHAN KOMUNIS MEREKA.



MENANGGAPI ADANYA PEMBERONTAKAN INI KABINET HATTA SEGERA BERSIDANG UNTUK MENENTUKAN SIKAP. BADAN PEKERJA KNIP MENYETUJUI SUATU UNDANG-UNDANG YANG MEMBERIKAN KEKUASAAN KEPADA PRESIDEN SOEKARNO SELAMA TIGA BULAN UNTUK MENGADAKAN USAHA PENYELAMATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. TNI KEMUDIAN BERGERAK MENGERAH KEMUKATAN MILITERNYA UNTUK MEMBEKAS MADIUN YANG JATUH KE TANGAN PKI.



DALAM WAKTU SINGKAT TNI BERHASIL MEREKUT MADIUN DAN MEMUKUL MUNDUR SATUAN-SATUAN FDR/PKI. PADA HARI KE-10 PASUKAN PERTAMA DARI DIVISI SILIWANGI BERHASIL MEMBEBAHKAN KOTA MADIUN DAN SEKITARNYA DARI TANGAN PEMBERONTAK.



MUSO SEBAGAI PIMPINAN PKI AKHIRNYA TERTEMBAK MATI DALAM SEBUAH PENGEPUKAN YANG DILAKUKAN OLEH TNI PADA 31 OKTOBER 1948 DI PONOROGO. MR. AMIR SJARIFUDIN YANG MENJADI PIMPINAN FDR AKHIRNYA TERTANGKAP DAN DIJATUHI HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER.



TEKANAN TERHADAP PEMERINTAH KEMBALI MUNCUL DARI BELANDA. PERISTIWA BERMULA DARI PIHAK BANGSA INDONESIA MAUPUN PIHAK BELANDA SAMA-SAMA MENGIRIMKAN SURAT KEPADA PIHAK KTN. SURAT TERSEBUT SAMA-SAMA BERISI DUGAAN TERHADAP PIHAK INDONESIA MAUPUN PIHAK BELANDA YANG DIANGGAP TIDAK MENGHORMATI HASIL PERJANJIAN RENVILLE. AKIBATNYA, SEBELUM TENGAH MALAM PADA 18 DESEMBER 1948, PIHAK BELANDA MENGUMUMKAN BAHWA BELANDA TIDAK TERIKAT LAGI TERHADAP PERJANJIAN RENVILLE.



TEPAT PADA 19 DESEMBER 1948, BELANDA MELAKUKAN SERANGAN TERHADAP IBUKOTA RI, YOGYA. PESAWAT TEMPUR BELANDA MENYERANG BANDARA MAGUWO DAN SEJUMLAH BANGUNAN PENTING DI YOGYAKARTA. PERISTIWA TERSEBUT MERUPAKAN AWAL DARI AGRESI MILITER BELANDA II.



PERISTIWA TERSEBUT MERUPAKAN AWAL DARI AGRESI MILITER BELANDA II. TENTARA BELANDA BERHASIL MENGUASAI KOTA YOGYAKARTA. TEMPAT-TEMPAT PENTING SEPERTI ISTANA PRESIDEN, BENTENG VREDEBURG, MARKAS BESAR KOMANDO DJAWA JATUH KETANGAN BELANDA.



MENGHADAPI SITUASI TERSEBUT, PRESIDEN SOEKARNO MEMBERIKAN MANDAT KEPADA MR. SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA YANG SAAT ITU BERADA DI SUMATERA UNTUK MEMBENTUK PEMERINTAHAN DARURAT RI.



TNI JUGA MELAKUKAN PERLAWANAN DAN MENGUNDURKAN DIRI KE LUAR KOTA.



KONDISI INI DIMANFAATKAN OLEH BELANDA UNTUK MENAWAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN BEBERAPA MENTERI DAN TOKOH RI LAINNYA.



PADA 1 MARET 1949 PUKUL 06.00 BERDASARKAN INSTRUKSI DARI PANGLIMA BESAR, PASUKAN TNI MELANCARKAN SERANGAN BESAR-BESARAN ATAS KOTA YOGYA YANG DIDUDUKI BELANDA.



DALAM WAKTU SINGKAT BELANDA BERHASIL DIPUKUL MUNDUR DAN MENINGGALKAN POS-POS MILITERNYA.



BEBERAPA PERSENJATAAN YANG DIMILIKI BELANDA BERHASIL DIREBUT OLEH TENTARA GERILYA. TEPAT JAM 12.00 SIANG, MUNCUL PERINTAH UNTUK MENGOSONGKAN KOTA YOGYA DAN KEMBALI MENUJU PANGKALAN GERILYA.



SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 INI MENJADI BUKTI KEPADA DUNIA INTERNASIONAL BAHWA TNI MASIH ADA DAN MEMILIKI KEKUATAN. PERISTIWA INI SEKALIGUS MEMPERKUAT POSISI INDONESIA DALAM PERUNDINGAN YANG SEDANG BERLANGSUNG DI DEWAN KEAMANAN PBB YANG MENJADIKAN PIHAK BELANDA MENJADI TERDESAK.



BELANDA AKHIRNYA MENYADARI BAHWA AGRESI MILITER YANG DILAKUKANNYA TIDAK MEMBERIKAN MANFAAT APA-APA DAN JUSTRU MENJADIKAN PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA SEMAKIN MELUAS DI BERBAGAI WILAYAH.



PIHAK INTERNASIONAL MELAKUKAN TEKANAN KEPADA BELANDA, TERUTAMA DARI PIHAK AMERIKA SERIKAT JUGA MENGANCAM AKAN MENGHENTIKAN BANTUANNYA KEPADA BELANDA. MAKA, TIDAK ADA JALAN LAIN SELAIN MENGIKUTI ANJURAN PBB UNTUK KEMBALI KE MEJA PERUNDINGAN.



PADA 7 MEI 1949 TERJADI PERTEMUAN ANTARA MR. MOH. ROEM SELAKU WAKIL PEMERINTAH RI DENGAN MR. ROYEN SELAKU WAKIL DARI BELANDA MENJADI JALAN DAMAI YANG AKAN MENGAKHIRI PERTIKAIAN INDONESIA DENGAN BELANDA. DALAM HASIL PERUNDINGAN TERSEBUT DISEBUTKAN BAHWA PIHAK REPUBLIK INDONESIA BERSEDIA UNTUK MENGHENTIKAN SERANGAN BERSENJATA DAN IKUT SERTA DALAM KONFERENSI MEJA BUNDAR DI DEN HAAG, BELANDA.



KEIKUTSERTAAN PEMERINTAH RI DALAM PERUNDINGAN SELANJUTNYA BUKAN TANPA SYARAT. PIHAK PEMERINTAH RI MENUNTUT AGAR TENTARA BELANDA DITARIK TERLEBIH DAHULU DARI WILAYAH YOGYA DAN MENGOSONGKANNYA. AKHIRNYA BELANDA MENERIMA PERSYARATAN TERSEBUT. PADA 2 JUNI 1949 PENGOSONGAN WILAYAH YOGYA DIMULAI. PENARIKAN MUNDUR TENTARA BELANDA INI DIAWASI OLEH OPSIR-OPSIR UNCI (UNITED NATIONS COMMISSIONS FOR INDONESIA).



DALAM RANGKA MENGHADAPI KONFERENSI MEJA BUNDAH DI DEN HAAG, MUCUL INISIATIF UNTUK MEMPERTEMUKAN WAKIL-WAKIL REPUBLIK DENGAN WAKIL-WAKIL DARI BFO (BIJENKOMST VOOR FEDERAL OVERLEG) YANG TERDIRI DARI PIMPINAN NEGARA-NEGARA BAGIAN YANG ADA DI INDONESIA. KONFERENSI INTER INDONESIA PERTAMA BERLANGSUNG DI YOGYAKARTA PADA 19-22 JULI 1949 YANG DIPIMPIN OLEH WAKIL PRESIDEN DRS. MOH HATTA. HASIL DARI KONFERENSI INTER INDONESIA PERTAMA ADALAH:



1. NEGARA INDONESIA SERIKAT DISETUJUI DENGAN NAMA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) BERDASARKAN DEMOKRASI DAN FEDERALISME (SERIKAT).
2. RIS AKAN DIKEPALAI OLEH SEORANG PRESIDEN DIBANTU OLEH MENTERI-MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN.
3. RIS AKAN MENERIMA PENYERAHAN KEDAULATAN, BAIK DARI REPUBLIK INDONESIA MAUPUN DARI KERAJAAN BELANDA.
4. ANGKATAN PERANG RIS ADALAH ANGKATAN PERANG NASIONAL DAN PRESIDEN RIS ADALAH PANGlima TERTINGGI ANGKATAN PERANG RIS.
5. PEMBENTUKAN ANGKATAN PERANG RIS ADALAH SEMATA-MATA SOAL BANGSA INDONESIA SENDIRI. ANGKATAN PERANG RIS AKAN DIBENTUK OLEH PEMERINTAH RIS DENGAN INTI DARI TNI DAN KNIL SERTA KESATUAN-KESATUAN BELANDA LAINNYA.



KONFERENSI INTER INDONESIA INI KEMUDIAN BERLANJUT DI JAKARTA PADA 31 JULI – 2 AGUSTUS 1949. HASIL DARI KONFERENSI KEDUA INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

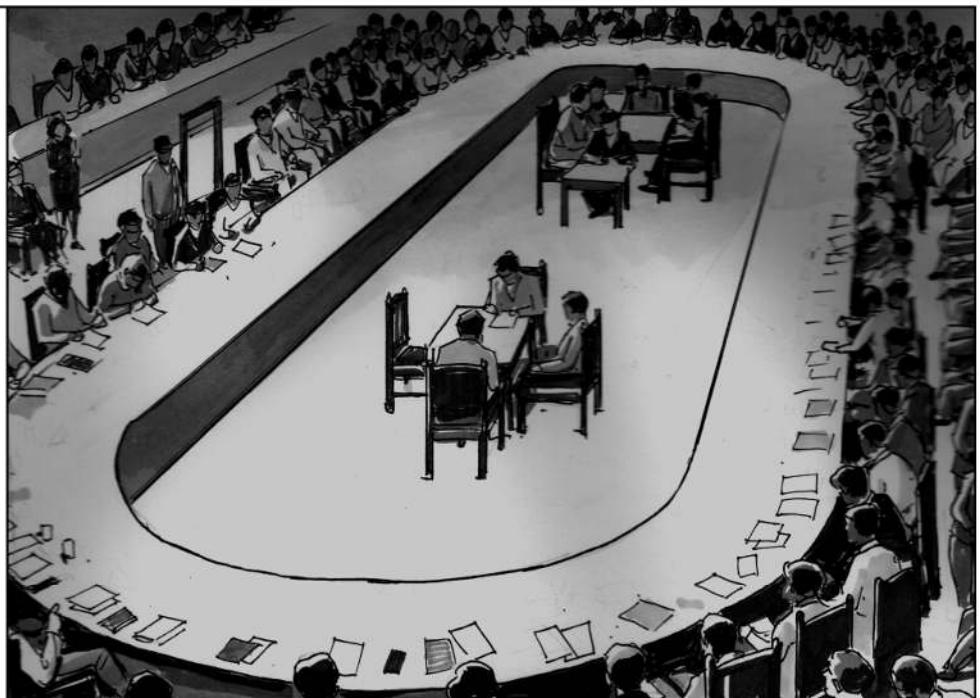
1. BENDERA RIS ADALAH SANG MERAH PUTIH.
2. LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA.
3. BAHASA RESMI RIS ADALAH BAHASA INDONESIA.
4. PRESIDEN RIS DIPILIH WAKIL RI DAN BFO. PENGISIAN ANGGOTA MPRS DISERAHKAN KEPADA KEBIJAKAN NEGARA-NEGARA BAGIAN YANG JUMLAHNYA ENAM BELAS NEGARA. KEDUA DELEGASI JUGA SETUJU UNTUK MEMBENTUK PANITIA PERSIAPAN NASIONAL YANG BERTUGAS MEMPERSIAPKAN SEGALA SESUATU YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KONFERENSI MEJA BUNDA.



DAMPAK DARI KONFERENSI INTER-INDONESIA ADALAH ADANYA KONSENSUS YANG DIBANGUN MELALUI KONFERENSI INTERN-INDONESIA YANG MENJADI MODAL BERTARAF BAGI PEMERINTAH RI, TERUTAMA DELEGASI INDONESIA YANG DITUNJUK UNTUK BERUNDING DENGAN BELANDA PADA KONFERENSI MEJA BUNDA (KMB) DI DEN HAAG. KEBERADAAN BFO DAN SIKAP TEGAS GDE AGUNG UNTUK MENOLAK INTERVENSI BELANDA MEMBUAT PEMERINTAH INDONESIA MEMILIKI LEGITIMASI YANG MAJIN KUAT UNTUK BERUNDING DENGAN BELANDA DI KMB.



PASCA KONFERENSI INTER INDONESIA, WAKIL-WAKIL RI YANG DIPIMPIN OLEH DRS. MOH. HATTA DAN WAKIL BFO YANG DIPIMPIN OLEH SULTAN HAMID BERANGKAT KE DEN HAAG MENGIKUTI KMB. DELEGASI DARI BELANDA DIWAKILI OLEH DR. MARSEVEEN, SEDIKANG DARI PIHAK PBB DIWAKILI OLEH CRICHTLEY. KONFERENSI INI DIADAKAN PADA 23 AGUSTUS-2 NOVEMBER 1949. HASIL DARI KONFERENSI INI ADALAH,



1. KERAJAAN BELANDA MENYERAHKAN KEDAULATAN ATAS INDONESIA YANG SEPENUHNYA TANPA SYARAT DAN TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI KEPADA RIS.
2. PENYERAHAN KEDAULATAN ITU AKAN DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL 30 DESEMBER 1949.
3. TENTANG IRIAN BARAT AKAN DIADAKAN PERUNDINGAN LAGI DALAM WAKTU 1 TAHUN SETELAH PENYERAHAN KEDAULATAN KEPADA RIS.
4. ANTARA RIS DAN KERAJAAN BELANDA AKAN DIADAKAN HUBUNGAN UNI INDONESIA-BELANDA, YANG AKAN DIKEPALAI OLEH RATU BELANDA.
5. KAPAL-KAPAL PERANG BELANDA AKAN DITARIK KEMBALI DARI INDONESIA DENGAN CATATAN, BAHWA BEBERAPA KORVET AKAN DISERAHKAN KEPADA RIS.
6. TENTARA KERAJAAN BELANDA AKAN SELEKAS MUNGKIN DITARIK MUNDUR DARI INDONESIA. SEDANGKAN TENTARA KERAJAAN HINDIA-BELANDA (KNIL) AKAN DIBUBARKAN DENGAN CATATAN, BAHWA PARA ANGGOTANYA YANG DIPERLUKAN AKAN DIMASUKKAN DALAM KESATUAN-KESATUAN TNI.
7. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT AKAN MENGEMBALIKAN HAK MILIK BELANDA DAN MEMBERIKAN HAK-HAK KONSESI SERTA IZIN BARU UNTUK PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA.
8. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT HARUS MEMBAYAR SEMUA UTANG BELANDA DARI 1942.



ADANYA HASIL DARI KMB INI SESUNGGUHNYA MENYELEWENG DARI AMANAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA SALAH SATU HASILNYA MENYEBUTKAN PEMBENTUKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. TETAPI, PEMERINTAH MENEGASKAN BAHWA KMB MERUPAKAN BATU LONCATAN KE ARAH CITA-CITA KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA.



PADA 23 DESEMBER 1949 DELEGASI RIS YANG DI-PIMPIN DRS. MOH. HATTA BERANGKAT KE BELANDA UNTUK MENANDATANGANI NASKAH KEDAULATAN DARI PEMERINTAH BELANDA. UPACARA PENANDATANGANI NASKAH PENGAKUAN KEDAULATAN DILAKUKAN PADA WAKTU YANG BERSAMAAN DI INDONESIA DAN DI BELANDA 27 DESEMBER 1949. DI NEGERI BELANDA RATU JULIANA, PERDANA MENTERI DR. WILLEM DREES, MENTERI SEBERANG LAUTAN MR. A.M.J.A. SASSEN DAN KETUA DELEGASI RIS Drs. MOH. HATTA MEMBUBUHKAN TANDATANGANNYA PADA NASKAH KEDAULATAN TERSEBUT.



DI JAKARTA, SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX DAN WAKIL TINGGI MAHKOTA A.H.J LOVINK DALAM SUATU UPACARA BERSAMA-SAMA MEMBUBUHKAN TANDA TANGANNYA PADA NASKAH PENYERAHAN KEKUASAAN.



KNIP AWALNYA SULIT MENERIMA HASIL-HASIL DARI KMB. HAL INI KARENA KMB DENGAN RISNYA BERTENTANGAN DENGAN CITA-CITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945. SEMENTARA ITU, TUNTUTAN DARI RAKYAT DI BERBAGAI DAERAH DATANG SILIH BERGANTI. KARENA DESAKAN RAKYAT SAAT ITU, SATU DEMI SATU NEGARA-NEGARA BUATAN BELANDA AKHIRNYA JATUH. KONSTITUSI RIS AKHIRNYA MEMBUKA KESEMPATAN UNTUK MEMBENTUK NEGARA KESATUAN SESUAI DENGAN KEINGINAN RAKYAT INDONESIA. MAKA, PADA 19 MEI 1950 TERCAPAI PERSETUJUAN ANTARA RI DAN RIS UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.



LANGKAH MENUJU NKRI TERSEBUT DITEMPUH MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN KONSTITUSI NEGARA KESATUAN RI OLEH BADAN PEKERJA KNIP DI YOGYA DAN OLEH SENAT SERTA DPR DI JAKARTA. KEMUDIAN DINYATAKAN BAHWA NEGARA KESATUAN RI DITETAPKAN 17 AGUSTUS 1950.



LANGKAH BERIKUTNYA ADALAH PENYERAHAN MANDAT MR. ASSAAT SELAKU PEMANGKU JABATAN PRESIDEN RI DAN MOH. HATTA SELAKU PM RIS KEPADA PRESIDEN SOEKARNO. MAKA, PADA AKHIRNYA PRESIDEN SOEKARNO DAN MOH. HATTA DILANTIK KEMBALI SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NEGARA KESATUAN RI.



UPACARA BENDERA 17 AGUSTUS 1950 DI ISTANA MERDEKA, RESMINYA INDONESIA KEMBALI KE NEGARA KESATUAN





TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

Jl. Imam Bonjol No 1 Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 3144743 | Fax : (021) 3924259
Email : munasprok@kemdikbud.go.id

 Museum Perumusan Naskah Proklamasi

 @MuseumNasProk

 @munasprok

www.munasprok.or.id